

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) merupakan salah satu perangkat daerah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 dan perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Nomor 82 tahun 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2016 Pasal 2 ayat 1 tentang Tugas pokok, Fungsi, Rincian tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan daerah, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2016 Pasal 17 ayat 3 menjelaskan bahwa Kesbangpol Provinsi Jawa Barat juga memiliki bidang politik dalam negeri yang mana memiliki tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam aspek politik dalam negeri meliputi fasilitas partai politik dan pemilihan umum serta fasilitas kelembagaan dan pendidikan budaya politik. Hal ini berarti bahwa pendidikan politik sangat erat kaitannya dengan tugas dari bidang tersebut.

Dalam suatu negara, partisipasi politik sangat penting dalam suatu negara dimana partisipasi masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan bersama untuk kepentingan umum. Partisipasi politik dapat muncul dengan sendirinya dalam hal ini, Kesbangpol berperan sebagai pemerintah dan masyarakat sipil yang sangat menentukan.

Pada hakikatnya, masyarakat memerlukan adanya pembentukan jati diri atau penanaman nilai dalam kehidupan seperti nilai beragama sampai bernegara. Oleh karena itu, pendidikan politik sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik. Dengan adanya pendidikan politik dapat membantu masyarakat untuk jauh dari ketidakpedulian akan keadaan negaranya. Menurut Kartaprawira (1999 : 97) Tujuan pendidikan politik adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat supaya dapat sepenuhnya menggunakan hak pilihnya dalam sistem politik. Oleh karena itu, diharapkan pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran pemilih dan mengurangi golput dan *money politic*.

Penulis akan melihat bagaimana peran Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi dibanding daerah lainnya. Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Bandung memiliki skor 59,24 atau berada di level 5 pada tahun 2020.

Tabel 1.1
Kabupaten/Kota dengan skor kerawanan tertinggi di Pulau Jawa

No.	Kabupaten/ Kota	IKP 2020 (%)	Kategori
1	Kab. Serang	66,04	Level 6
2	Kab. Kendal	65,33	Level 6
3	Kab. Karawang	63,77	Level 5
4	Kab. Cianjur	63,77	Level 5
5	Kab. Tasikmalaya	62,42	Level 5
6	Kab. Pandeglang	60,80	Level 5
7	Kab. Mojokerto	60,73	Level 5
8	Kab. Lamongan	60,34	Level 5
9	Kab. Bandung	59,24	Level 5
10	Kab. Sleman	58,49	Level 5

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bandung Tahun 2020

Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik pada setiap momentum pemilu serta rendahnya partisipasi kontestan pemilu dalam proses bimbingan politik masyarakat sebab terdapatnya pemahaman jika memilih merupakan suatu hak bukan kewajiban.

Tabel 1.2

Kabupaten/Kota dengan skor kerawanan tertinggi se-Indonesia

No	Kab/Kota	IKP Pilkada Kab/Kota 2020	Kategori	KSP	PPBA	Kontestasi	Partisipasi Politik
33	KOTA BINJAI	59,35	level 5	59,85	44,96	68,32	72,15
34	KABUPATEN BANDUNG	59,24	level 5	63,88	64,43	42,83	66,97
35	KABUPATEN PASER	58,73	level 5	60,40	60,41	45,34	74,35

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bandung Tahun 2020

Pada tabel 1.2 bisa kita amati jika partisipasi politik Kabupaten Bandung memiliki skor 66,97 hal tersebut apabila dilihat dari level IKP tahun 2020 termasuk kedalam level tinggi karena lebih dari 63,88.

Tabel 1.3
Jumlah Kabupaten/Kota berdasarkan level IKP 2020



Sumber : Bawaslu Kabupaten Bandung Tahun 2020

Kesbangpol sebagai badan fasilitator seringkali bekerjasama dengan berbagai lembaga atau organisasi terhadap masyarakat maupun kaum pelajar. Dalam hal ini, Kesbangpol memberikan pendidikan politik berupa sosialisasi terhadap masyarakat maupun kaum pelajar tentang betapa pentingnya partisipasi politik dalam sebuah negara. Selain itu, Kesbangpol juga bertanggung jawab dalam menanamkan sifat nasionalisme dan patriotisme dalam jiwa generasi penerus bangsa.

Kesbangpol Provinsi Jawa Barat sering bekerjasama dengan Kesbangpol Kabupaten Bandung dalam melaksanakan pendidikan politik di Kabupaten Bandung. Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung yaitu *Forum Group discussion* Penyusunan Model Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila pada tahun 2020 dimana dalam forum tersebut dihadiri oleh mojang jajaka Jawa Barat. Pancasila menjadi tolak ukur dalam pendidikan politik dengan adanya pancasila pendidikan politik akan terus berkembang sesuai dengan aturan-aturan dan sila-sila dalam pancasila.

Selain itu, Kesbangpol Provinsi Jawa Barat mengadakan pendidikan politik pada tahun 2020 dengan tema “*Ngawangun Kasadaran Demokrasi Dina Raraga Pamilihan Pamingpin pikeun Nagjeugkeun Pangaweruh Politik*” dengan tujuan masyarakat Jawa Barat kedepannya harus menjadi pemilih yang cerdas terlebih lagi pada tahun 2020 akan ada pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2021 Kesbangpol Provinsi Jawa Barat mengadakan *Talkshow* dengan tema “Gebyar Masyarakat Muda Demokrasi Jawa Barat” kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota parpol, pramuka, para duta kampus dan paguyuban Mojang Jajaka Jawa Barat. Kegiatan tersebut diadakan untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan perhatian para geerasi muda terhadap wawasan kebangsaan, politik dan demokrasi sebagai salah satu poin penilaian indeks demokrasi tahun 2021.

Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan politik yaitu webinar dengan tema “Generasi Milenial produktif Cinta Pancasila” pada tahun 2021. dalam webinar tersebut diskusi mengenai peran pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Animasi Politik (Animatik) Awards 2022 dimana ajang tersebut ialah pembelajaran politik sekaligus sosialisasi pemilu serta pilkada 2024 melalui karya animasi dengan mengangkat tema “Kampanye Politik Secara Santun” Sebanyak 447 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti kegiatan tersebut.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, dia menjelaskan berdasarkan informasi yang dia terima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, daftar pemilih tetap (DPT) di Jawa Barat mencapai sekitar 33,7 juta pemilih yang merupakan jumlah terbanyak di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi salah satu dasar dari pihak kesbangpol untuk mulai melakukan sosialisasi pemilu sejak jauh-jauh hari. Karya animasi yang menang dalam lomba tersebut pun akan digunakan untuk mensosialisasikan pemilu 2024.

Lewat kegiatan tersebut Kesbangpol juga memberikan edukasi tidak hanya pemilih pemula saja melainkan seluruh lapisan masyarakat mengingat dengan adanya perkembangan zaman teknologi pun berkembang sangat pesat dan segala sesuatu saat ini banyak menggunakan teknologi sehingga tidak hanya diikuti oleh mahasiswa atau pelajar dan kalangan muda saja melainkan masyarakat umum pun boleh mengikuti jadi tidak dibatasi oleh usia.

Karya animasi tersebut selain menjadi bahan sosialisasi kepada masyarakat akan di distribusikan juga kepada KPU, Bawaslu, Diskominfo, dan kepada pihak terkait lainnya khususnya di Jawa Barat. Sehingga karya-karya yang dihasilkan tidak hanya di diamkan secara percuma.

Selain Animatik, Kesbangpol Provinsi Jawa Barat juga meluncurkan kegiatan Gerakan Orang Muda Politik (GOTIK) tahun 2022 dalam rangka pendidikan politik dan peningkatan peran serta generasi muda dalam peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Barat. Kegiatan tersebut berupa *talkshow* yang dihadiri oleh kalangan mahasiswa dan pelajar lainnya.

Dari berbagai kegiatan diatas yang menarik dan melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini adalah kegiatan pendidikan politik yang berbasis animasi seperti Animasi Politik dimana saat ini zaman sudah berkembang dan teknologi sudah semakin canggih sehingga diperlukan adanya inovasi pendidikan politik dengan melibatkan teknologi. Selain itu, kegiatan pendidikan politik yang dikemas dengan hiburan dan tanya jawab seperti Gerakan Orang Muda Politik (GOTIK) dimana dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dan ada hiburan untuk menghilangkan kejenuhan selama kegiatan.

Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 - 2022”** dengan harapan dapat memberikan informasi kepada khalayak umum juga sebagai masukan atau evaluasi bagi proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah dan sektor masyarakat, serta mampu

memahami dampak pendidikan politik terhadap partisipasi politik masyarakat, khususnya pemilih pemula.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan pendidikan politik di Kabupaten Bandung tahun 2020 - 2022?
2. Bagaimana upaya dan kendala yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pendidikan politik di Kabupaten Bandung tahun 2020 - 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa jauh Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan pendidikan politik di Kabupaten Bandung tahun 2020 - 2022
2. Menganalisa proses penyelenggaraan pendidikan politik serta berdiskusi mengenai upaya dan kendala yang dihadapi oleh Kesbangpol Provinsi Jawa Barat selama berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan politik di Kabupaten Bandung Tahun 2020 – 2022

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti dan orang lain. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memperoleh gambaran langsung terkait penyelenggaraan pendidikan politik oleh Kesbangpol Provinsi Jawa Barat tahun 2020 - 2022
 - b. Sebagai bahan informasi mengenai data empiris yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya

- c. Dapat digunakan untuk menelaah atau menambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Politik yang secara khusus mengkaji tentang pendidikan politik

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan serta bahan evaluasi bagi pemerintah khususnya Kesbangpol Provinsi Jawa Barat agar meningkatkan kualitas pendidikan politik serta memkasimalkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bandung dan diharapkan berguna bagi kebijakan yang akan diambil oleh Kesbangpol Provinsi Jawa Barat.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sebagai contoh bagaimana cara menyelesaikan masalah, maka diperlukan adanya kerangka pemikiran agar suatu penelitian dapat tersusun dengan baik. Kerangka pemikiran ini mengilustrasikan jalannya pemikiran peneliti, dimana dalam penelitian ini untuk melihat peran Kesbangpol Provinsi Jawa Barat.

Menurut Horton dan Hunt (1993 : 46) peran (role) adalah bagaimana seseorang bertindak dalam kaitannya dengan status mereka. Peranan adalah serangkaian gerak-gerik yang harus diambil oleh seseorang dalam posisi tertentu dalam masyarakat. Dengan adanya peranan dapat memicu seseorang ada bahkan dapat sampai batas tertentu mengantisipasi tindakan orang lain. Orang yang memiliki keterkaitan dengan hal tersebut akan mampu mengubah perilakunya dalam menanggapi tindakan orang lain yang ada di kelompoknya. Hubungan yang terjalin antar peran individu dalam masyarakat merupakan contoh hubungan sosial. Peran dapat ditata oleh orang yang memiliki peran.

Pendidikan merupakan upaya untuk secara sadar dan sengaja merubah perilaku seorang insan, baik secara perseorangan maupun kelompok, untuk mematangkan individu melalui pengajaran serta latihan. (Sugiarto,dkk. 2013: 3).

Menurut Kartaprawira (1988 : 54) pendidikan politik yaitu suatu tindakan yang sadar untuk meningkatkan pengetahuan politik pada masyarakat sehingga dapat menginterpretasikan dan hidup dalam lingkungan masyarakat dengan sungguh-sungguh inti yang terkandung dalam sistem politik yang akan

ditingkatkan supaya masyarakat sanggup terlibat secara maksimal dalam sistem politiknya.

Pendidikan orang dewasa pada hakekatnya mencakup pendidikan politik. Proses penanaman insan menjadi “intelektual politik” yang duduk di menara gading keilmuan atau menjadi individu yang kritis dan cerdas yang “terisolasi” dari masyarakat di sekitarnya tidak ditonjolkan dalam jenis pendidikan ini. Namun lebih menekankan pada hubungan yang dimiliki individu dengan orang lain atau dengan komunitasnya di tengah-tengah bidang sosial; dalam kaitannya dengan faktor sosial ekonomi dan budaya dalam konteks politik; dalam situasi konflik yang disebabkan oleh berbagai perbedaan atau dengan adanya pluralisme (pluralisme budaya). (Kartini Kartono, 2009: 63)

Kita berpartisipasi dalam menentukan aturan dan keputusan yang berlaku bagi masyarakat ketika kita berpartisipasi dalam kegiatan politik. Misalnya, jika kita memilih seorang pemimpin dia memiliki wewenang untuk menetapkan aturan dan kebijakan masyarakat, apakah masyarakat menyukainya atau tidak jika pemimpin dipilih dalam pemilihan umum dan berkuasa. Bentuk pemerintahan saat ini ditentukan oleh pemimpin. Secara alami, keterlibatan kita dalam politik misalnya, pemilihan umum mengarah pada pemilihan pemimpin. Meskipun peraturan dan kebijakan sebelumnya tidak menguntungkan atau bahkan merugikan kita, kita harus mempertanggungjawabkan pilihan yang telah kita buat. Karena itu adalah konsekuensi dari berpartisipasi dalam kegiatan politik yang harus kita terima.

Tujuan mendasar dari pendidikan politik. Pertama, melalui pendidikan politik diharapkan setiap orang dapat mengenali dan memahami nilai-nilai ideal dalam sistem politik saat ini. Kedua, setiap individu mampu menjadi warga negara yang mempunyai kesadaran politik dan kesadaran politik. Kemampuan mengemban tanggung jawab sebagai hasil pendidikan politik yang dibuktikan dengan pergeseran cara pandang dan peningkatan partisipasi dalam arena politik.

Kami meyakini bahwa pendidikan politik yang diselenggarakan di Indonesia secara unik dari kepribadian bangsa dan kekayaan spiritual itu sendiri

dan telah disepakati di tingkat nasional demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terlaksananya tujuan. Mengingat betapa pentingnya belajar tentang politik bagi seluruh warga negara Indonesia, lantas tujuan politik negara yang pada hakikatnya yakni representasi langsung dari aspirasi dan harapan rakyat Indonesia.

Adapun kerangka pemikiran jika dibuat ke dalam skema diagram dapat dilihat sebagai berikut :

DIAGRAM 1.4
SKEMA KERANGKA TEORITIS



Dari diagram diatas dijelaskan bahwa pendidikan politik perlu adanya peranan individu atau masyarakat dan kelompok sosial lainnya untuk mengubah dan mematangkan manusia melalui upaya pendidikan atau pelatihan sehingga mereka dapat memahami nilai-nilai yang termaktub dalam sistem politik. Proses pendewasaan dan pendidikan tersebut lah yang akan menciptakan seorang individu menjadi intelektual politik dan membuat partisipasi politik menjadi meningkat.